

## **Analisis Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung**

**Hariyanto<sup>1</sup>, Happy Oktisari<sup>2</sup>, Ria Arifianti<sup>3</sup>**

**<sup>1</sup>Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, <sup>2</sup>Satpol PP Kabupaten Lampung Timur,**

**<sup>3</sup>Universitas Padjajaran, Sumedang**

**Email: [hariyanto@gmail.com](mailto:hariyanto@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada organisasi pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan tupoksi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat kinerjanya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan dan staf bagian terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen resmi, laporan instansi, dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan teknik triangulasi dan diskusi sejawat untuk menjaga validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tupoksi dinilai cukup baik. Pegawai umumnya melaksanakan tugas sesuai standar kualitas dan hasil yang diharapkan, meskipun sebagian pekerjaan belum selalu selesai tepat waktu. Faktor pendukung mencakup aturan kerja yang jelas, ketersediaan sumber daya manusia, dan fasilitas kantor, sedangkan hambatan utama meliputi beban kerja tinggi, penugasan di luar tupoksi, dan inkonsistensi pelaksanaan tugas. Temuan ini menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan, penegakan disiplin, serta pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan efektivitas kinerja bagian terkait.

**Kata Kunci: Efektivitas, Tugas Pokok dan Fungsi.**

### **ABSTRACT**

The implementation of core duties and functions in local government organizations is an important factor in ensuring effective and responsive governance. This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of duties and functions in the Protocol and Leadership Communication Section of Bandar Lampung City and to identify factors that support or hinder its performance. The research method used is qualitative with a descriptive design. Primary data was obtained thru in-depth interviews with relevant department heads and staff, while secondary data was collected thru official document studies, agency reports, and scientific literature. Analysis was conducted thru the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using triangulation techniques and peer discussion to ensure validity. The research results indicate that the effectiveness of implementing the job descriptions is considered quite good. Employees generally perform their duties according to the expected quality and results standards, although some tasks are not always completed on time. Supporting factors include clear work rules, the availability of human resources, and office facilities, while the main obstacles include high workloads, assignments outside of job descriptions, and inconsistent task execution. These findings emphasize the importance of continuous coaching, discipline enforcement, and employee competency development to

improve the effectiveness of the relevant departments' performance.  
**Keywords: Effectiveness, Main Duties and Functions.**

### **Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada instansi pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel (Kamarasyid, 2019). Di Kota Bandar Lampung, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung koordinasi kebijakan, protokoler, komunikasi pimpinan, serta dokumentasi kegiatan pemerintah. Namun, penempatan pegawai yang kurang memperhatikan kompetensi dan profesionalisme telah menimbulkan tantangan berupa rendahnya efektivitas kerja dan timbulnya tumpang tindih tugas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi mutu pelayanan publik. Fenomena ini menegaskan perlunya analisis mendalam terkait efektivitas pelaksanaan tupoksi bagian tersebut (Bukhari & Pasaribu, 2019).

Efektivitas organisasi publik dapat diukur melalui pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Hayati & Yulianto, 2021). Data awal menunjukkan bahwa beberapa kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tidak selalu selesai tepat waktu, meskipun sebagian besar hasil pekerjaan telah memenuhi standar yang diharapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya faktor pendukung, seperti aturan yang jelas, ketersediaan fasilitas kerja, dan sumber daya manusia yang berkomitmen, tetapi juga terdapat hambatan, termasuk beban kerja yang tinggi dan pembagian tugas yang kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tupoksi.

Kajian tentang efektivitas tupoksi juga relevan dengan kebutuhan penguatan kapasitas birokrasi dan reformasi pelayanan publik (Gioh, 2021). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas kerja di sektor publik seringkali dipengaruhi oleh faktor komunikasi organisasi, disposisi pegawai, kualitas sumber daya manusia, serta struktur birokrasi. Dalam konteks Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung, evaluasi menyeluruh terhadap dimensi-dimensi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kinerja bagian ini dan hubungannya dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pimpinan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambatnya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kinerja aparatur, sekaligus memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas organisasi publik di lingkungan pemerintahan daerah.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Pathuloh, 2017). Secara umum, efektivitas dipahami sebagai tingkat ketercapaian sasaran atau target yang direncanakan dalam batas waktu tertentu (Husen et al., 2023). Konsep ini tidak hanya menyoroti hasil akhir, tetapi juga menilai

bagaimana proses pelaksanaan mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas pekerjaan. Dalam konteks organisasi pemerintahan, efektivitas menunjukkan sejauh mana pelayanan publik dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata terhadap pencapaian visi dan misi instansi terkait (Meferiani et al., 2024).

Beberapa temuan mengemukakan bahwa efektivitas organisasi juga bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal (Lupitasari et al., 2023). Faktor seperti satuan waktu, satuan hasil kerja, dan kualitas kerja menjadi indikator penting (Fauzi, 2022). Organisasi dinilai efektif apabila mampu menyelesaikan program sesuai perencanaan, menjaga keseimbangan kepentingan anggotanya, dan mempertahankan keberlanjutan operasionalnya. Dengan demikian, efektivitas bukan hanya pencapaian tujuan formal, tetapi juga keberhasilan menjaga stabilitas dan relevansi organisasi di tengah dinamika lingkungan (Risnawan, 2017).

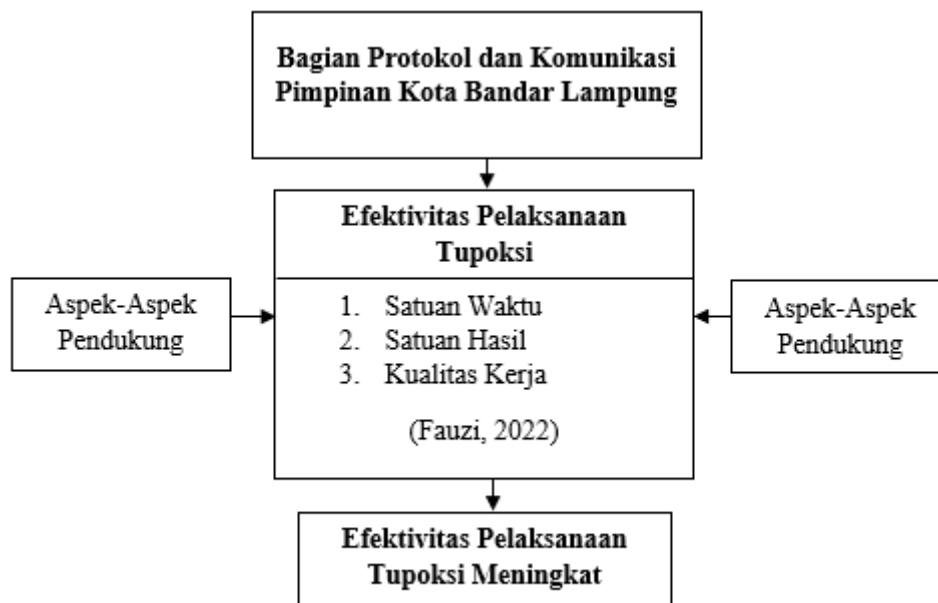
### **Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)**

Tugas pokok dan fungsi adalah rangkaian tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan pegawai dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya (Asmoro & Resmiatini, 2020). Tugas pokok menggambarkan kewajiban utama yang wajib dilaksanakan, sedangkan fungsi merupakan rincian kegiatan yang saling berkaitan untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut (Wongkar et al., 2016). Dalam organisasi pemerintahan, tupoksi disusun berdasarkan ketentuan formal, visi, dan misi instansi agar setiap bagian dan individu memiliki pedoman kerja yang jelas serta tidak terjadi tumpang tindih kewenangan (Sawir, 2019).

Pelaksanaan tupoksi yang baik akan mempengaruhi efektivitas kerja pegawai maupun kinerja organisasi secara keseluruhan (Basri & Aarsal, 2022). Penetapan tupoksi yang rinci membantu pembagian kerja lebih terstruktur, meminimalkan konflik internal, dan meningkatkan koordinasi antarbagiannya (Syam, 2020). Selain itu, tupoksi juga menjadi dasar evaluasi kinerja dan pengembangan kapasitas pegawai. Dengan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing, pegawai dapat bekerja lebih fokus, sehingga hasil kerja lebih optimal dan selaras dengan tujuan organisasi (Saputra & Heliyani, 2024).

## Kerangka Pikir

### Metode Penelitian



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung. Fokus penelitian diarahkan untuk mengungkap fenomena, proses, dan kondisi yang terjadi di lapangan secara holistik. Informasi dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan para informan kunci sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti (Arikunto, 2017).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 5 informan yang dipilih secara *purposive sampling*, meliputi Kepala Bagian, Kepala Subbagian, serta 3 staf terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan dua jenis data ini bertujuan untuk memperkuat validitas dan keandalan temuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan ketekunan pengamatan, triangulasi sumber, dan diskusi dengan rekan sejawat. Penelitian dilaksanakan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung.

## Hasil dan Pembahasan

### Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung

Dalam penelitian ini, efektivitas dipahami sebagai tingkat keberhasilan atau pencapaian target dan sasaran yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi organisasi. Upaya mencapai tujuan tersebut melibatkan keseluruhan aspek dalam organisasi agar pelaksanaan tugas berjalan secara efisien dan optimal. Berdasarkan temuan penelitian, pengukuran

efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung mengacu pada pandangan (Fauzi, 2022) yang mencakup tiga dimensi, yaitu: (1) satuan waktu, (2) satuan hasil, dan (3) kualitas kinerja.

### **Satuan Waktu**

Waktu memiliki peran penting sebagai tolok ukur penyelesaian pekerjaan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung, pemanfaatan waktu menjadi indikator utama efektivitas kerja. Setiap kegiatan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh pegawai agar instruksi yang diberikan pimpinan dapat dipahami dan dijalankan sesuai sasaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pimpinan rutin memberikan arahan dan pembinaan, sedangkan pegawai berupaya melaksanakan tugas tepat waktu meski terkadang menerima penugasan di luar tupoksi.

Efektivitas kerja tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap jadwal, tetapi juga pada pemahaman pegawai terhadap prosedur dan tujuan organisasi. Arahan yang konsisten dan penyampaian informasi yang akurat terbukti memperkuat pelaksanaan tugas di lapangan. Kendala seperti perbedaan interpretasi atau ketidakseimbangan kemampuan antarpegawai dapat menghambat kinerja, sehingga pengarahan langsung dari pimpinan menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas kerja.

Secara keseluruhan, ketepatan waktu menjadi faktor kritis dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Tupoksi. Penilaian berbasis satuan waktu membantu memantau kinerja, kualitas pelayanan, serta pencapaian target organisasi. Meskipun terdapat hambatan teknis seperti keterlambatan laporan, secara umum pegawai mampu menyesuaikan diri dan menjaga disiplin waktu sebagai dasar peningkatan efektivitas kerja dan pelayanan publik.

### **Satuan Hasil**

Satuan hasil merupakan elemen penting yang harus dianalisis dan ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Peran utama dalam optimalisasi satuan hasil berada pada sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola waktu, tenaga, dan keterampilannya secara efektif untuk kepentingan organisasi maupun pengembangan diri. Peningkatan kualitas hasil kerja memerlukan SDM yang profesional sejak tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan, sehingga pemerintah perlu memprioritaskan ketersediaan pegawai yang kompeten.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung telah diberi ruang untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya, meskipun variasi kinerja tetap ada. Untuk memperkuat kapasitas pegawai, pimpinan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun pelatihan. Kebijakan ini dimaksudkan agar pengetahuan, keterampilan teknis, dan profesionalisme pegawai terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, sehingga produktivitas dan loyalitas terhadap organisasi dapat meningkat.

Secara keseluruhan, efektivitas kerja ditentukan oleh ketepatan penyelesaian tugas sesuai rencana dan standar kualitas yang ditetapkan. Arahan pimpinan, evaluasi hasil kerja, serta kesempatan pengembangan diri menjadi faktor kunci untuk menjaga kualitas dan kuantitas pekerjaan. Dengan pendekatan ini, pekerjaan dapat dilaksanakan secara efisien tanpa mengorbankan mutu, sekaligus meminimalkan pemborosan sumber daya. Strategi ini

diharapkan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

### **Kualitas Kerja**

Kualitas kerja pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung pada dasarnya telah dijalankan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Mayoritas pegawai memahami program kerja, kewenangan, serta tanggung jawabnya, dan berkomitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsi meskipun masih terdapat kendala terkait keterbatasan kemampuan individu dan padatnya beban kerja. Sikap pegawai terhadap kebijakan bervariasi: sebagian besar mendukung dan menjalankan program dengan baik, beberapa menunjukkan keraguan atau sikap netral, tergantung manfaat yang dirasakan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik, meskipun kadang terjadi keterlambatan pelaporan akibat padatnya kegiatan. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung juga mempengaruhi pencapaian target waktu dan kualitas kerja. Namun, secara umum mereka tetap menjaga profesionalisme, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif kepada masyarakat, dan siap menerima arahan pimpinan.

Secara keseluruhan, kualitas kerja pegawai dinilai cukup baik bahkan di tengah keterbatasan, seperti selama masa pandemi dan kondisi operasional yang tidak ideal. Hal ini menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan, kejelasan petunjuk pelaksanaan, serta penyediaan sarana memadai agar tugas pokok dan fungsi dapat dijalankan lebih efektif dan menghasilkan pelayanan publik yang memuaskan.

### **Aspek-Aspek Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung**

#### **Aspek Pendukung**

Keberadaan tugas pokok dan fungsi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung ditetapkan untuk memperkuat faktor-faktor pendukung efisiensi kinerja pemerintah, khususnya dalam pelayanan dan pengelolaan kegiatan yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Beberapa aspek yang menunjang pelaksanaannya antara lain:

1. Tersedianya ketentuan yang tegas mengenai tugas pokok dan fungsi tersebut, sehingga seluruh pegawai memiliki pedoman kerja yang jelas sebagai acuan pelaksanaan tugas.
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Meskipun jumlah personel masih relatif terbatas, kebijakan yang ada tetap dapat diimplementasikan.
3. Fasilitas perkantoran yang dapat menunjang pelaksanaan berbagai aktivitas pegawai. Namun, kualitas dan kuantitas sarana pendukung ini masih memerlukan perhatian lebih dari pimpinan agar setiap program dan kegiatan dapat terlaksana secara lebih optimal.

#### **Aspek Penghambat**

Dalam penerapan tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung, masih dijumpai sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas kinerja. Beberapa faktor penghambat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas pokok yang diberikan pimpinan terkadang belum dilaksanakan secara konsisten, sehingga sebagian pegawai merasa pekerjaan yang mereka tangani kurang sesuai dengan bidang tanggung jawabnya, yang berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas.
2. Keterbatasan anggaran operasional menyebabkan pegawai tidak selalu dapat menjalankan tugas dengan optimal, bahkan dalam beberapa kesempatan penugasan lapangan dilakukan dengan kondisi yang kurang memadai.
3. Dalam aspek tata laksana kerja, masih terdapat ketidaksesuaian antara program yang telah direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan, misalnya pembatalan kegiatan oleh pimpinan yang kemudian dialihkan kepada wakil atau Kepala SKPD sebagai perwakilan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandar Lampung telah berjalan dengan cukup baik. Dari segi ketepatan waktu, sebagian besar pegawai telah melaksanakan tugas sesuai jadwal meskipun masih terdapat beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan tepat waktu. Dari sisi pencapaian hasil, kinerja pegawai sudah memenuhi target yang diharapkan, dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan menunjukkan pelaksanaan tugas yang sesuai standar. Efektivitas ini juga didukung oleh keberadaan aturan yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan kebijakan, serta fasilitas kantor yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Namun demikian, masih terdapat hambatan seperti beberapa pegawai yang belum optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya, adanya kecenderungan pegawai melaksanakan pekerjaan di luar tugas pokoknya, serta padatnya beban kerja yang terkadang menimbulkan tumpang tindih tugas dan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan sanksi yang tegas terhadap pegawai yang belum bekerja secara maksimal agar kedisiplinan dan kinerja dapat meningkat. Selain itu, pegawai yang bertugas di lapangan hendaknya menyesuaikan pekerjaan yang dilakukan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan kapasitas pegawai juga penting dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan teknis, agar kualitas sumber daya manusia semakin baik dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi dapat mencapai hasil yang optimal.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2017). *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*.
- Asmoro, B. T., & Resmiatini, E. (2020). Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa dengan Pendekatan Analisis Jabatan (Studi Kasus Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 85–99.
- Basri, M., & Arsal, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Pegawai Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Sosial Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 5(4), 1127–1138. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.52>

- Bukhari, B., & Pasaribu, S. E. (2019). Pengaruh Motivasi, Kompetensi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 89–103. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3365>
- Fauzi, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Stress Kerja, Beban Kerja dan Lingkungan Kerja. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 134–148. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1>
- Gioh, A. (2021). Pelayanan Publik E-Government Di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1).
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2021). Efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 98–115.
- Husen, N. H. R., Tuanay, W., & Selanno, H. (2023). Efektivitas Kerja Pegawai Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon. *JIGE*, 4(1), 229–239.
- Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah. *MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 10(2), 326–353. <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738>
- Lupitasari, N., Setianingsih, E. L., Putranti, I. R., & Afrizal, T. (2023). The Urgency of Regional Head Protocol Policy Arrangements in the Context of Realizing the Effectiveness of Protocolal Duties of Regional Heads of Batang Regency, Central Java Province. *PERSPEKTIF*, 12(2), 691–697. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8576>
- Meferiani, D., Sardiyo, S., & Basri, A. (2024). Efektivitas Kinerja Pegawai Di Bagian Protokol Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Interprof*, 10(1), 34–44. <https://doi.org/10.32767/interprof.v10i1.2574>
- Pathuloh, A. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Protokoler Kepala Daerah terhadap Koordinasi Keprotokolan dalam Mewujudkan Efektivitas Tugas-tugas Protokoler Kepala Daerah. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 33–43. [www.jurnal.uniga.ac.id](http://www.jurnal.uniga.ac.id)
- Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 156–166.
- Saputra, O., & Heliyani, H. (2024). Analisis Implementasi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ekobistek*, 13(3), 120–128. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i3.808>
- Sawir, M. (2019). Tinjauan Mengenai Fungsi Birokrasi Pemerintahan Di Indonesia. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 208–221.
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2), 128–152.



Wongkar, A. H., Rumapea, P., & Liando, D. M. (2016). Perilaku Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 3, 134–152.